



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDARTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PELESTARIAN ARSIP**
3. NHK : **212742**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 941.979.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/65 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 230.115.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 184.864.000
4. Tanah Seluas 171 m2 di KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA
Rp. 82.000.000
5. Tanah Seluas 1190 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
6. Tanah Seluas 1502 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 241.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000
3. MOTOR, HONDA X1B02N04LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 8.500.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 15.500.000
5. MOTOR, HONDA ASTREA STAR/ C86 CUB Tahun 1982, HASIL



SENDIRI	Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	5.500.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	42.836.828
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	1.231.315.828
III. HUTANG		Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.181.315.828

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.